

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., & Narbuko, C. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anderson, J. E. (2007). *Public policymaking* (6th ed.). Boston: Houghton Mifflin.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Babbie, E. (2010). *The Practice of Social Research* (12th ed.). Belmont: Wadsworth.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Gedeian, A., et al. (1991). *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: BPFE.
- Laswell, H. D., & Kaplan, A. (1950). *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*. New Haven: Yale University Press.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja, A. R. (2003). *Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Rahayu, S. K., & Kusdianto, A. (2023). Fragmentasi kelembagaan dalam reformasi perpajakan digital di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 77–92.

- Riduwan. (2004). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Rizqiyanto, N., dkk. (2025). Tantangan implementasi pajak daerah digital pada UMKM. *Jurnal Ekonomi Digital dan Kebijakan Daerah*, 3(1), 45–60.
- Sedarmayanti. (1995). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Setyagama, A. (2018). Kapasitas kelembagaan legislatif dalam pengawasan kebijakan pajak daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 133–146.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi, A. E., & Suhartiningsih. (2008). Potensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah di Sukoharjo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 56–70.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6769.